

Implementasi Layanan Bimbingan Konseling Untuk Mengatasi Ketimpangan Sosial Ekonomi Dalam Upaya Mendorong Mobilitas Sosial Peserta Didik

Afwan Syahril Manurung¹, Nisa Afifah², Yoserizal Saragih³, Zanniuro Sururi⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,3},

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan²,

STAI Samora Pematangsiantar⁴

Email: afwansyahril789@gmail.com¹, afifahnisaa@uinsyahada.ac.id², yoserizal@uinsu.ac.id³,
zanniuro123@gmail.com⁴

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan dalam mendorong mobilitas sosial serta mengkaji bagaimana layanan Bimbingan Konseling (BK) dapat berfungsi sebagai intervensi strategis untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi peserta didik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap enam jurnal relevan, buku akademik, serta dokumen kebijakan pendidikan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki kontribusi signifikan terhadap mobilitas sosial melalui peningkatan akses pekerjaan, pendapatan, dan partisipasi sosial. Namun, berbagai hambatan struktural masih menghambat fungsi pendidikan sebagai alat mobilitas, termasuk ketimpangan ekonomi, disparitas geografis, perbedaan modal budaya, serta kesenjangan kualitas pendidikan. Temuan penelitian menegaskan bahwa layanan BK berperan penting dalam memberikan asesmen psikologis, konseling individual/kelompok, pendampingan akademik, manajemen stres, advokasi akses beasiswa, dan perencanaan karier bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Layanan BK juga berfungsi menjembatani siswa dengan berbagai kebijakan pemerintah seperti KIP, BOS, Wajib Belajar 12 Tahun, dan Merdeka Belajar. Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi antara pendidikan yang berkualitas, kebijakan publik yang inklusif, serta layanan BK yang profesional merupakan kunci untuk mendorong mobilitas sosial yang lebih adil dan merata di Indonesia.

Kata Kunci. *Pendidikan, Mobilitas Sosial, Ketimpangan Sosial Ekonomi, Bimbingan Konseling, Kebijakan Pendidikan.*

Abstract. This study aims to analyze the role of education in promoting social mobility and examine how Guidance and Counseling (BK) services can function as a strategic intervention to address socioeconomic inequality among students. The study used a qualitative approach with library research methods, through analysis of six relevant journals, academic books, and national education policy documents. The results of the study indicate that education has a significant contribution to social mobility by increasing access to employment, income, and social participation. However, various structural barriers still hinder the function of education as a mobility tool, including economic inequality, geographic disparities, differences in cultural capital, and gaps in educational quality. The research findings confirm that BK services play a crucial role in providing psychological assessments, individual/group counseling, academic mentoring, stress management, advocacy for scholarship access, and career planning for students from low-income families. BK services also function to bridge students with various government policies such as the KIP (Student Information System), BOS (School Operational Assistance), 12-Year Compulsory Education, and Independent Learning. This study concludes that the integration of quality education, inclusive public policies, and

professional guidance and counseling services is key to promoting fairer and more equitable social mobility in Indonesia.

Keywords. *Education, Social Mobility, Socioeconomic Inequality, Guidance And Counseling, Educational Policy.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tuntutan global (Andriani, 2019). Di tengah kemajuan teknologi dan informasi, permasalahan pendidikan semakin kompleks karena peserta didik tidak hanya dituntut menguasai aspek akademik, tetapi juga kecakapan sosial, emosional, dan kemampuan berpikir kritis. Dalam konteks psikologi pendidikan, perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh interaksi antara lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendampingan yang komprehensif, salah satunya melalui layanan bimbingan konseling (BK) di sekolah. Salah satu isu pendidikan yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan peserta didik adalah mobilitas sosial, yaitu perpindahan individu dari satu lapisan sosial ke lapisan lainnya (Cahyaningsih and Karunia Assidik 2021).

Pendidikan sering diposisikan sebagai jalur utama untuk mencapai mobilitas sosial yang positif. Namun, ketimpangan akses dan mutu pendidikan masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerataan kesempatan belajar di Indonesia (Suharto, 2010). Ketimpangan sosial ekonomi ini tidak hanya berdampak pada prestasi akademik, tetapi juga kondisi psikologis, motivasi, self-efficacy, serta peluang mobilitas sosial peserta didik. Dalam perspektif teori sosiologi pendidikan, hubungan pendidikan dan mobilitas sosial dijelaskan melalui dua pendekatan. Teori fungsionalis Davis dan Moore menempatkan pendidikan sebagai sarana seleksi untuk memetakan individu ke posisi sosial tertentu berdasarkan prestasi dan kompetensi (Supriyono 2018).

Sebaliknya, teori kritis Pierre Bourdieu menilai sekolah justru dapat memperkuat ketimpangan sosial melalui mekanisme reproduksi budaya, di mana peserta didik dari keluarga dengan modal sosial dan budaya tinggi lebih diuntungkan dalam proses pendidikan. Implikasi dari kedua teori ini sangat relevan bagi bidang bimbingan konseling, karena konselor berperan penting dalam membantu peserta didik dari berbagai latar belakang sosial ekonomi untuk mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh kesempatan belajar yang adil. Dalam konteks pendidikan bimbingan konseling, layanan BK memiliki peran strategis untuk mengatasi ketimpangan tersebut melalui asesmen psikologis, layanan responsif, penguatan motivasi, intervensi berbasis konseling individual/kelompok, serta pendampingan karier. Selain itu, profesi konselor dan supervisi konseling menjadi sangat penting dalam memastikan kualitas layanan yang diberikan sesuai standar etika dan kebutuhan perkembangan peserta didik. Konseling masyarakat juga memiliki kontribusi dalam memperkuat peran keluarga dan lingkungan sosial untuk mendukung peningkatan peluang mobilitas sosial anak. Lebih jauh, dinamika ini menuntut adanya penataan kurikulum layanan BK yang mampu berkolaborasi dengan kebijakan pendidikan nasional, termasuk upaya pemerataan pendidikan dan pembangunan karakter peserta didik. Oleh karena itu, kajian mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana layanan bimbingan konseling dapat membantu peserta didik menghadapi ketimpangan sosial ekonomi dan mendorong mobilitas sosial yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menelusuri secara mendalam berbagai teori, konsep, dan temuan empiris mengenai hubungan antara pendidikan dan mobilitas sosial melalui sumber literatur yang kredibel. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menafsirkan data berbasis teks, sehingga memungkinkan peneliti memahami fenomena secara komprehensif dari perspektif sosiologi pendidikan dan bimbingan konseling (Sugiyono 2022). Dalam proses penelitian, berbagai bahan literatur dimanfaatkan sebagai sumber utama. Bahan tersebut meliputi buku-buku ilmiah yang membahas pendidikan, mobilitas sosial, psikologi pendidikan, teori modal sosial dan budaya, serta layanan bimbingan konseling. Selain itu, jurnal nasional dan internasional yang relevan, laporan penelitian, artikel kebijakan, publikasi dari instansi pemerintah seperti Kemendikbud dan BPS, serta dokumen resmi pendidikan turut dianalisis. Berbagai sumber ini diakses melalui database digital seperti Google Scholar, SINTA, ERIC, DOAJ, ResearchGate, dan perpustakaan elektronik Perpustakaan. Untuk mempermudah pengelolaan referensi, peneliti menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley atau Zotero (Rohmad 2016). Seluruh kegiatan penelitian dilakukan secara daring (online) melalui perpustakaan digital dan portal jurnal akademik, sehingga tidak memerlukan lokasi lapangan tertentu. Teknik pengumpulan data dimulai dengan mengidentifikasi sumber literatur menggunakan kata kunci yang relevan, seperti “mobilitas sosial”, “stratifikasi pendidikan”, “*modal sosial dan budaya*”, serta “*bimbingan konseling*”. Setelah itu dilakukan proses seleksi berdasarkan kriteria relevansi, tahun terbit, dan kualitas ilmiah. Literatur yang dipilih kemudian dianalisis dengan mengekstraksi teori, temuan empiris, faktor penyebab ketimpangan pendidikan, serta kaitannya dengan peluang mobilitas sosial dan peran layanan BK (Waruwu 2024).

Data yang terkumpul selanjutnya dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu, seperti teori mobilitas sosial, ketimpangan akses pendidikan, serta dukungan psikologi pendidikan dan bimbingan konseling. Melalui proses interpretasi dan sintesis, peneliti menyusun pemahaman komprehensif mengenai bagaimana pendidikan berperan dalam membuka atau justru membatasi peluang mobilitas sosial, serta bagaimana layanan BK dapat berkontribusi mengurangi kesenjangan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap 6 jurnal yang relevan, ditemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara latar belakang sosial ekonomi orang tua dan prestasi belajar siswa. Tabel berikut merangkum 6 jurnal yang dianalisis dalam studi pustaka ini:

Jurnal yang Relevan		
No	Nama Penulis (tahun)	Judul Jurnal
1	(Reja Renggana Hambani dan Gunartati, 2023)	Peran Pendidikan Dalam Mobilitas Sosial di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya
2	Maya Muizatil Lutfillah et al, 2022)	Pengelolaan Pendidikan Dasar Dikaitkan dengan Mobilitas Sosial
3	(Muh. Yusuf Seknun, 2015)	Pendidikan Sebagai Media Mobilitas Sosial

4	(Edo, Abdulloh, and Muhammad Yasin, 2024)	"Dampak Kesenjangan Akses Pendidikan dan Faktor Ekonomi Keluarga terhadap Mobilitas Sosial."
5	(Amrullah et all, 2025)	"Pendidikan dan Pengaruhnya terhadap Mobilitas Sosial."
6	(Angglepi et all, 2025)	"Tantangan Mobilitas Pelajar di Sebrang Sungai Kampar Kiri dalam Menempuh Pendidikan."

Pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan mobilitas sosial, khususnya dalam masyarakat modern yang berbasis pada sistem meritokrasi. Salah satu peran utama pendidikan adalah membuka akses terhadap kesempatan kerja yang lebih baik. Individu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memperoleh pekerjaan yang lebih stabil, bergengsi, dan bergaji tinggi. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana peningkatan kemampuan, tetapi juga menjadi modal penting dalam meningkatkan taraf hidup individu maupun keluarganya (Tilaar, 2012). Selain itu, pendidikan juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan ekonomi. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata penghasilan pekerja dengan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki dampak ekonomi yang nyata dalam kehidupan seseorang (BPS, 2023). Pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan individu memenuhi kebutuhan dasar, berinvestasi pada pendidikan anak, serta membuka peluang bagi mobilitas antargenerasi. Peran pendidikan dalam menciptakan mobilitas sosial juga terlihat dari kemampuannya mengangkat individu dari keluarga miskin keluar dari siklus kemiskinan.

Pendidikan tinggi memberikan peluang bagi generasi muda dari latar belakang ekonomi lemah untuk memperoleh posisi sosial dan ekonomi yang lebih baik daripada orang tuanya. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi kemiskinan struktural yang diwariskan dari generasi ke generasi (Suharto, 2010). Tak hanya secara ekonomi, pendidikan juga meningkatkan persepsi sosial terhadap individu. Gelar akademik atau latar belakang pendidikan tertentu sering kali menjadi simbol status dan kehormatan dalam masyarakat. Pendidikan memberikan pengakuan sosial yang memperbesar peluang individu untuk memperoleh posisi yang lebih tinggi dalam struktur sosial, baik secara formal maupun informal (Bourdieu, 1977). Dalam konteks ini, pendidikan berfungsi tidak hanya sebagai alat mobilitas ekonomi, tetapi juga sebagai alat mobilitas simbolik. Lebih lanjut, pendidikan juga memperluas partisipasi sosial. Individu yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran sosial, keterlibatan dalam kegiatan komunitas, dan partisipasi politik yang lebih aktif. Dengan demikian, pendidikan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif, demokratis, dan partisipatif (Tilaar, 2012). Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa peran pendidikan sebagai alat mobilitas sosial masih menghadapi sejumlah tantangan. Ketimpangan akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih terjadi, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi tinggi dan rendah. Menurut Bourdieu, sistem pendidikan sering kali mereproduksi ketimpangan sosial karena lebih menguntungkan mereka yang memiliki modal budaya dan sosial yang tinggi. Dalam hal ini, pendidikan berpotensi gagal menjadi alat mobilitas apabila tidak disertai dengan pemerataan kesempatan dan kualitas (Bourdieu, 1977).

Hubungan antara pendidikan dan mobilitas sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan kompleks. Pertama, akses yang adil dan setara ke

pendidikan menjadi faktor utama. Ketidakmerataan akses pendidikan, seperti perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan atau antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda, dapat membatasi peluang individu dari latar belakang kurang beruntung untuk meningkatkan status sosial melalui Pendidikan (Seknun, 2015). Selain itu, kualitas pendidikan juga sangat menentukan keberhasilan mobilitas sosial. Pendidikan yang berkualitas tinggi, yang mencakup pengajaran efektif, fasilitas memadai, dan kurikulum yang relevan, mampu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan secara signifikan sehingga membuka peluang mobilitas sosial yang lebih besar. Sebaliknya, pendidikan dengan kualitas rendah tidak memberikan dasar yang kuat untuk perubahan sosial yang positif. Dukungan dari keluarga dan komunitas juga merupakan faktor penting. Lingkungan keluarga yang memberikan dukungan moral, finansial, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif meningkatkan kemungkinan keberhasilan akademis anak dan mendorong mobilitas sosial. Namun, latar belakang sosial ekonomi keluarga sering kali menjadi penghambat utama. Anak-anak dari keluarga dengan status ekonomi rendah cenderung menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pendidikan berkualitas, sehingga peluang mereka untuk melakukan mobilitas sosial menjadi terbatas (Nitaliya, 2025). Selain itu, kesempatan kerja dan kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja turut memengaruhi hubungan ini. Tidak semua lulusan dengan kualifikasi tinggi mendapatkan pekerjaan yang sesuai, sehingga peluang mobilitas sosial bisa terhambat. Peran pendidikan formal dan nonformal juga penting untuk diperhatikan. Pendidikan formal masih menjadi tolok ukur utama dalam dunia kerja dan status sosial, namun pendidikan nonformal yang memberikan keterampilan praktis semakin dibutuhkan dalam mendukung mobilitas sosial, terutama di era modern yang menuntut keahlian teknis dan kemampuan beradaptasi cepat.

Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan digital juga menjadi faktor eksternal yang memengaruhi efektivitas pendidikan sebagai alat mobilitas sosial, terutama bagi generasi milenial yang sangat bergantung pada teknologi dalam proses belajar dan pengembangan diri. Selain itu, pengaruh sosial dan budaya tidak kalah penting. Norma sosial, nilai budaya, dan struktur masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana pendidikan diterima dan dimanfaatkan untuk mobilitas sosial. Dalam masyarakat tradisional, sistem pendidikan dan mobilitas sosial saling mempengaruhi secara dinamis. Terakhir, motivasi dan pola pikir individu juga berperan besar dalam mobilitas sosial. Motivasi untuk maju dan pola pikir progresif dalam menggapai kesempatan seringkali didorong oleh pengalaman dan informasi yang diperoleh melalui Pendidikan (Taqiyyuddin, 2023). Dengan demikian, meskipun pendidikan merupakan kunci utama dalam mobilitas sosial, keberhasilan mobilitas sangat bergantung pada faktor-faktor struktural, sosial, dan individu yang mempengaruhi akses, kualitas, dan pemanfaatan pendidikan.

Meskipun pendidikan secara teoritis diharapkan mampu menjadi alat mobilitas sosial yang efektif, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan yang menghambat peran tersebut. Hambatan ini bersifat struktural, kultural, dan geografis, dan berkontribusi pada ketimpangan dalam akses serta hasil pendidikan yang diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Salah satu hambatan utama adalah ketimpangan ekonomi. Anak-anak dari keluarga miskin memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan, mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Keterbatasan ini mencakup biaya pendidikan, transportasi, perlengkapan belajar, hingga kebutuhan dasar seperti makan dan tempat tinggal. Menurut BPS, tingkat partisipasi sekolah menurun tajam pada kelompok usia 16 tahun ke atas yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, yang menunjukkan bahwa banyak siswa dari kelompok ini terpaksa putus sekolah karena tekanan ekonomi (BPS, 2023). Selain faktor ekonomi,

disparitas geografis juga menjadi tantangan besar. Masyarakat di wilayah terpencil, perdesaan, dan daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) menghadapi akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan. Infrastruktur pendidikan yang kurang memadai, keterbatasan jumlah guru berkualitas, dan minimnya akses terhadap teknologi menyebabkan kualitas pembelajaran di daerah-daerah ini jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah perkotaan (Tilaar, 2012). Akibatnya, siswa dari daerah terpencil memiliki peluang yang lebih kecil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau bersaing dalam dunia kerja.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah ketimpangan kualitas pendidikan. Sekalipun siswa dari latar belakang ekonomi lemah berhasil mengakses sekolah, kualitas pendidikan yang diterima sering kali jauh di bawah standar. Hal ini terjadi karena ketidakseimbangan distribusi sumber daya pendidikan, termasuk tenaga pengajar, sarana prasarana, dan kurikulum yang tidak adaptif terhadap kebutuhan lokal maupun global (Suharto, 2010). Kualitas pendidikan yang buruk akan berdampak pada rendahnya kompetensi lulusan, yang pada akhirnya memperkecil peluang untuk naik ke strata sosial yang lebih tinggi. Lebih jauh, modal sosial dan budaya juga memengaruhi kemampuan individu dalam mengakses dan memanfaatkan pendidikan sebagai sarana mobilitas. Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa sistem pendidikan cenderung menguntungkan kelompok sosial yang memiliki modal budaya seperti bahasa, nilai-nilai, dan pola komunikasi yang sesuai dengan institusi pendidikan formal. Anak-anak dari keluarga berpendidikan tinggi memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menavigasi sistem pendidikan karena terbiasa dengan “bahasa sekolah”, sedangkan anak-anak dari keluarga dengan modal budaya rendah seringkali merasa asing dan tidak percaya diri di lingkungan sekolah (Bourdieu, 1977).

Selain itu, stigma dan diskriminasi sosial juga menjadi penghalang tidak langsung dalam mobilitas pendidikan. Kelompok marginal seperti anak-anak difabel, minoritas agama, atau etnis tertentu, kerap menghadapi perlakuan tidak setara dalam lingkungan pendidikan. Mereka lebih rentan mengalami putus sekolah, bullying, atau tidak mendapatkan layanan pendidikan inklusif yang layak. Padahal, pendidikan seharusnya berfungsi sebagai ruang terbuka bagi semua individu, tanpa diskriminasi atas dasar latar belakang sosial, budaya, atau fisik. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pendidikan memiliki potensi besar sebagai alat mobilitas sosial, peran tersebut tidak dapat diwujudkan secara merata jika tidak disertai dengan intervensi struktural yang menysasar akar-akar ketimpangan sosial, ekonomi, dan budaya.

Pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa pendidikan dapat diakses secara merata dan dapat berfungsi sebagai alat mobilitas sosial. Peran kebijakan publik sangat menentukan dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, berbagai kebijakan telah diimplementasikan untuk menjawab tantangan ketimpangan akses dan kualitas pendidikan yang berdampak langsung pada mobilitas sosial masyarakat. Salah satu kebijakan afirmatif yang menonjol adalah program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP-Kuliah, yang dirancang untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin agar tetap bisa mengakses pendidikan. Program ini memberikan bantuan dana pendidikan langsung kepada siswa dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Kehadiran KIP sangat penting sebagai bentuk jaring pengaman sosial dalam bidang pendidikan, terutama untuk mencegah putus sekolah karena alasan ekonomi (Kemendikbud, 2022). Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran rutin melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dana BOS berfungsi untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah agar peserta didik tidak terbebani oleh biaya pendidikan tambahan. Dalam banyak kasus, BOS telah membantu sekolah-sekolah di daerah terpencil untuk tetap menjalankan kegiatan pembelajaran meski dengan sarana terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi anggaran pendidikan memberikan ruang bagi sekolah untuk beradaptasi dengan kebutuhan lokal (Kemendikbudristek, 2021). Namun demikian, tidak semua kebijakan berjalan optimal di lapangan. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah ketidaktepat sasaran program bantuan pendidikan. Banyak anak dari keluarga miskin tidak mendapatkan KIP karena tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Ini menunjukkan pentingnya integrasi data antar lembaga seperti Kemendikbud, Kemensos, dan Dinas Dukcapil agar bantuan pendidikan lebih tepat guna dan merata (Suharto, 2010). Di sisi lain, pemerintah juga telah menjalankan kebijakan wajib belajar 12 tahun sebagai upaya untuk menjamin bahwa seluruh warga negara minimal menyelesaikan pendidikan menengah. Kebijakan ini penting dalam rangka menciptakan fondasi pendidikan yang kuat sebagai syarat mobilitas sosial. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak kendala, mulai dari rendahnya partisipasi di jenjang SMA/SMK, keterbatasan fasilitas sekolah di pedalaman, hingga minimnya tenaga pengajar di beberapa wilayah (BPS, 2023). Pemerintah juga mendorong program Merdeka Belajar, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan kontekstual. Konsep ini memberikan otonomi kepada guru dan satuan pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum sesuai karakteristik siswa dan daerah. Kebijakan ini secara tidak langsung membuka ruang bagi peningkatan kualitas pendidikan, yang pada akhirnya dapat memperkuat daya saing lulusan dari berbagai latar sosial (Kemendikbudristek, 2022).

Selain aspek anggaran dan kurikulum, kebijakan dalam hal pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan juga sangat penting dalam konteks mobilitas sosial. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Kemendikbudristek telah mengembangkan program revitalisasi SMK dan balai latihan kerja (BLK) untuk memperluas peluang kerja dan kewirausahaan. Ini menjadi langkah strategis mengingat sebagian besar penduduk usia kerja berada di sektor informal dan membutuhkan keterampilan praktis untuk mengakses mobilitas vertikal (Tilaar, 2012). Namun tantangan terbesar dari semua kebijakan tersebut adalah disparitas implementasi di daerah-daerah. Sekolah-sekolah di wilayah tertinggal sering kali tidak mampu mengakses kebijakan pusat secara optimal karena keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem manajemen sekolah yang belum mapan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas lembaga pendidikan lokal dan pelibatan aktif pemerintah daerah agar kebijakan pusat benar-benar dapat diterjemahkan menjadi perubahan di lapangan.

Implementasi Layanan Bimbingan Konseling Untuk Mengatasi Ketimpangan Sosial Ekonomi Dalam Upaya Mendorong Mobilitas Sosial Peserta Didik

Hasil kajian literatur dari enam jurnal yang dianalisis menunjukkan bahwa ketimpangan sosial ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi belajar dan peluang mobilitas sosial peserta didik. Temuan ini menegaskan bahwa latar belakang keluarga, modal sosial-budaya, akses pendidikan, serta kualitas layanan sekolah merupakan faktor kunci yang membentuk perkembangan peserta didik. Dalam konteks tersebut, layanan Bimbingan Konseling (BK) memegang peranan strategis sebagai upaya intervensi psikologis, edukatif, dan sosial untuk membantu peserta didik mengatasi hambatan struktural maupun personal.

Jurnal-jurnal yang telah dikaji memperlihatkan bahwa mobilitas sosial dipengaruhi oleh kemampuan pendidikan untuk menyediakan akses terhadap pekerjaan,

pendapatan, dan status sosial yang lebih baik. Namun berbagai hambatan ekonomi—seperti keterbatasan biaya sekolah, sarana belajar yang minim, dan tekanan kebutuhan rumah tangga membuat banyak anak dari keluarga miskin sulit meningkatkan prestasi akademik, bahkan berpotensi putus sekolah (BPS, 2023). Ketimpangan ini diperparah oleh disparitas geografis dan ketidakmerataan kualitas pendidikan, terutama di daerah pedalaman dan 3T. Siswa yang berasal dari wilayah tersebut menghadapi keterbatasan fasilitas, guru berkualitas, teknologi, dan dukungan belajar yang memadai. Kesenjangan modal budaya dan sosial sebagaimana dijelaskan oleh Bourdieu (1977) membuat anak-anak dari keluarga berpendidikan rendah kesulitan menavigasi lingkungan sekolah yang memiliki "bahasa akademik" tertentu. Dalam situasi demikian, BK menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan psikologis, edukatif, dan sosial bagi peserta didik dari keluarga rentan agar tidak semakin terpinggirkan.

Ketimpangan sosial ekonomi tidak hanya berdampak pada hasil belajar, tetapi juga pada kondisi psikologis siswa, seperti rendahnya motivasi, kecemasan belajar, rendahnya self-efficacy, serta kurangnya dukungan emosional keluarga. Pada titik ini, asesmen BK berfungsi penting untuk memetakan kebutuhan peserta didik melalui asesmen kondisi keluarga dan lingkungan sosial, asesmen minat, bakat, dan gaya belajar, analisis hambatan psikologis dan akademik, pemetaan risiko putus sekolah. Melalui asesmen ini, konselor dapat merumuskan strategi intervensi yang tepat sasaran. BK berperan memastikan bahwa siswa yang mengalami hambatan ekonomi atau kultural tetap mendapatkan dukungan psikologis dan akademik yang memadai. BK memiliki ruang untuk membantu siswa secara langsung melalui layanan responsif seperti Konseling Individual dan Kelompok.

Layanan ini membantu siswa mengatasi tekanan ekonomi keluarga, rendahnya kepercayaan diri, bullying terkait status sosial, serta gangguan emosi yang menghambat prestasi belajar. Dukungan Akademik dan Motivasi Belajar. BK berperan dalam memberikan strategi belajar efektif, pendampingan belajar, dan penguatan motivasi melalui teknik-teknik konseling seperti *solution-focused counseling*, pendekatan humanistik, maupun pendekatan kognitif-perilaku. Manajemen Stress dan Kesejahteraan Psikologis. Ketimpangan ekonomi sering menimbulkan stress rumah tangga pada anak. BK membantu meningkatkan resiliensi, regulasi emosi, dan kemampuan mengatasi masalah. Layanan Afirmasi dan Advokas. BK memastikan siswa dari keluarga rentan mendapatkan akses terhadap KIP (Kartu Indonesia Pintar), BOS, beasiswa daerah, akses makanan tambahan, program bimbingan karier. Konselor berperan sebagai advokat yang menghubungkan siswa dengan dukungan eksternal tersebut.

Mobilitas sosial sangat dipengaruhi oleh pilihan karier. Oleh karena itu, layanan BK dalam perencanaan karier sangat penting, terutama untuk mengenalkan peluang karier berdasarkan minat dan bakat siswa, memberikan informasi studi lanjut dan beasiswa, menyelaraskan kompetensi siswa dengan kebutuhan pasar kerja, mengembangkan keterampilan kerja (*soft skills dan life skills*). Peserta didik dari keluarga miskin cenderung memiliki eksplorasi karier yang terbatas karena kurangnya informasi karier di lingkungan keluarga. Dengan demikian, BK membantu membuka wawasan karier yang lebih luas dan mengurangi hambatan struktural dalam proses mobilitas sosial. Agar layanan BK benar-benar efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi, beberapa aspek perlu diperkuat Kompetensi Profesional Konselor. Konselor harus memahami dinamika ketimpangan sosial, teori mobilitas sosial, psikologi keluarga miskin, dan intervensi berbasis kerentanan sosial. Supervisi Konseling yang Berkelanjutan. Supervisi diperlukan agar konselor mendapatkan umpan balik profesional, mengembangkan kualitas layanan, serta memastikan praktik konseling sesuai standar etik dan kebutuhan peserta didik.

Konseling Masyarakat. BK tidak hanya bekerja di ruang sekolah, tetapi juga merangkul masyarakat melalui edukasi orang tua tentang peran pendidikan, pembinaan keluarga rentan, peningkatan modal sosial siswa melalui komunitas, kerja sama dengan perangkat desa, puskesmas, dan lembaga sosial. Pendekatan ini memperluas jangkauan intervensi BK dalam mendorong mobilitas sosial generasi muda. BK berperan strategis dalam membantu siswa mengakses berbagai kebijakan pendidikan seperti KIP dan KIP Kuliah, Program Wajib Belajar 12 Tahun, Program Merdeka Belajar, Program revitalisasi pendidikan vokasi, Beasiswa daerah atau CSR. Konselor bertugas memastikan bahwa siswa-siswa dari kelompok marginal benar-benar mendapatkan manfaat kebijakan ini. Integrasi antara konselor, guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan lembaga sosial menjadi kunci efektivitas layanan BK sebagai motor penggerak mobilitas sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dari enam jurnal yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam mendorong mobilitas sosial peserta didik, namun ketimpangan sosial ekonomi masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan kesempatan belajar. Latar belakang ekonomi keluarga, modal sosial-budaya, kualitas layanan pendidikan, serta akses terhadap fasilitas belajar terbukti berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik dan peluang peningkatan status sosial. Dalam konteks ini, layanan Bimbingan Konseling (BK) memiliki peran strategis sebagai intervensi psikologis dan edukatif untuk meminimalkan dampak ketimpangan tersebut. Melalui asesmen, layanan responsif, advokasi, serta bimbingan karier, BK membantu siswa mengatasi hambatan personal dan struktural yang menghalangi proses mobilitas sosial. Efektivitas layanan BK semakin meningkat ketika didukung supervisi profesional, kolaborasi sekolah-masyarakat, serta integrasi dengan kebijakan pemerintah seperti KIP, BOS, dan program Merdeka Belajar. Dengan demikian, implementasi BK yang komprehensif dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan peluang mobilitas sosial yang lebih adil bagi seluruh peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, T., Humaedah, L., & Arifin, Z. (2025). PENDIDIKAN DAN Pengaruhnya terhadap MOBILITAS SOSIAL. *MHS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, 1(2), 173-183.
- Andriani. (2019). Memahami Konsep Manajemen Layanan Konsultasi dalam Bimbingan Konseling. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Konseling*
- Angglepi, M. S., Susanti, E., & Haironi, N. (2025). TANTANGAN MOBILITAS PELAJAR DI SEBRANG SUNGAI KAMPAR KIRI DALAM MENEMPUH PENDIDIKAN. *Journal Education, Sociology and Law*, 1(1), 757-764.
- Bourdieu, P. (1977). *Cultural Reproduction and Social Reproduction*. In J. Karabel & A. H.

- Halsey (Eds.), *Power and Ideology in Education*.
- BPS. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Cahyaningsih, Endah, and Gallant Karunia Assidik. 2021. "Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Untuk Meningkatkan Minat Belajar Pada Materi Teks Berita." *Buletin Pengembangan Perangkat Pembelajaran* 3(1):1-7. doi: 10.23917/bppp.v3i1.19385.
- Edo, A., & Yasin, M. (2024). Dampak Kesenjangan Akses Pendidikan dan Faktor Ekonomi Keluarga terhadap Mobilitas Sosial. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (SINOVA)*, 2(3), 317-326.
- Kemendikbud. (2022). *Data Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021 & 2022). *Merdeka Belajar: Capaian dan Evaluasi*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Nitaliya, B. (2025). PENDIDIKAN DAN TRANSFORMASI SOSIAL TENTANG Pandangan Sosiologi Terhadap Dinamika Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (J-Diteksi)*,
- Rohmad, Siti Sarah. 2016. *Pengembangan Instrumen Angket Penelitian*.
- Seknun, M. Y. (n.d.). (2015). *Pendidikan sebagai Media Mobilitas Sosial*. UIN Alauddin Makassar.
- Suharto, E. (2010). *Kebijakan Sosial: Sebuah Pengantar*. Bandung: Alfabeta.
- Taqiyyuddin, H. A., Salsabila, A., Amalia, A. M., Azizah, N., & Hanani, R. (2023). POTENSI PENDIDIKAN DALAM MENCIPTAKAN MOBILITAS SOSIAL BAGI ANAK BANGSA DI NEGERI JIRAN. *ALKADIMAT*,
- Sugiyono. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)." *Metode Penelitian Kualitatif* 5.
- Supriyono. 2018. "PENTINGNYA MEDIA PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAHULUAN Berbicara Soal Kualitas Pendidikan , Tidak Dapat Dilepaskan Dari Proses Pembelajaran Di Ruang Kelas . Pembelajaran Di Ruang Kelas Mencakup Dua Aspek Penting Yakni Guru Dan Siswa . Guru Mempunyai." II:43-48.
- Tilaar, H.A.R. (2012). *Manifesto Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas.
- Waruwu, Marinu. 2024. "Metode Penelitian Dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan Dan Kelebihan." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9(2):1220-30. doi: 10.29303/jipp.v9i2.2141.